

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hakikat manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan sosial (monodualis). Sebagai makhluk individu, manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang merupakan satu kesatuan. Manusia dibekali dengan potensi atau kemampuan yang berupa akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Manusia dikaruniai hak asasi, yaitu hak dasar atau pokok yang melekat pada setiap pribadi manusia. Dengan hak asasi ini setiap manusia bebas merdeka menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya.

Selain kodratnya sebagai makhluk individu, manusia adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan zaman purba, ketika kebutuhan manusia belum kompleks seperti sekarang, manusia sering memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia membutuhkan orang lain, tata masyarakat, lembaga-lembaga sosial, dan negara. Aristoteles menyatakan bahwa “manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia harus berinteraksi dengan manusia lain.”

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan lepas dari masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan terikat oleh aturan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Linton dalam Hartono dan Azis (1990: 89), bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.” Dapat dikatakan bahwa manusia adalah anggota dari masyarakat. Seiring perkembangan zaman, masyarakat akan selalu berubah. Masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Masyarakat yang ada di perkotaan lebih cenderung cepat menerima informasi dan mudah menerima

perubahan yang baru, dibandingkan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan seperti gotong royong dan kebersamaan. Sedangkan masyarakat perkotaan anggotanya cenderung bersifat individualis. Tetapi sekarang masyarakat pedesaan pun tidak sedikit pola tingkah lakunya seperti masyarakat perkotaan yang terbuka terhadap pengaruh dari luar dan bersifat individualis karena penyebab dari perubahan sosial di masyarakat. Menurut Gillin (dalam Soerjono Soekanto, 1990: 18) menyatakan bahwa:

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Dari uraian diatas perubahan sosial yang jelas terjadi di pedesaan disebabkan oleh perubahan kondisi geografi, komposisi penduduk dan kebudayaan. Hal ini ditandai dan ditemukan pada hampir disetiap pedesaan dengan banyaknya tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan yang ditempati oleh selain penduduk desa tersebut, kemudian menjamurnya minimarket sehingga pasar tradisional mengalami pendapatan yang menurun, dan mudahnya mengakses internet sehingga masyarakat pedesaan dapat dengan bebas mengetahui hal-hal terbaru yang mengakibatkan masyarakat pedesaan khususnya anak-anak muda mengetahui hal-hal yang positif maupun negatif.

Masyarakat pedesaan tinggal dalam sebuah wilayah yang dinamakan desa atau kelurahan dengan batas-batas tertentu. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Menurut pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala desa sebagai dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan dan dibantu oleh sekretaris desa sebagai pegawai negeri sipil serta perangkat desa lainnya, seperti seksi keamanan dan lain-lain. Kepala desa memiliki masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.

Masyarakat pedesaan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, karena sebagian wilayah pedesaan digunakan sebagai lahan pertanian, seperti sawah, perkebunan, dan lain-lain. Masyarakat pedesaan juga tidak sedikit yang bermata pencaharian sebagai nelayan karena letak geografis mereka yang berdekatan dengan pantai. Ada perbedaan antara masyarakat pedesaan yang ada di pegunungan dengan dataran rendah atau pantai. Masyarakat pedesaan yang ada di pegunungan lebih bersifat ramah tamah karena dipengaruhi keadaan cuaca yang sejuk. Sedangkan masyarakat pedesaan yang dekat dengan pantai biasanya berwatak keras baik dari tindakan maupun ucapan karena keadaan cuaca yang panas. Sehingga tidak jarang masyarakat pedesaan yang berdekatan dengan pantai atau dataran rendah lebih sering mengalami bentrokan atau konflik dibandingkan masyarakat pedesaan yang berada di pegunungan.

Konflik dapat terjadi karena tidak adanya kesesuaian atau keselarasan sesuatu hal dalam masyarakat, dapat juga ditandai dengan perdebatan dan perbedaan yang sangat mencolok, dimana keinginan keduanya tidak dapat dicapai dengan baik atau disatukan. Hal ini terjadi karena pluralisme atau keanekaragaman merupakan realitas hidup dalam masyarakat modern. Konflik juga dapat terjadi karena akibat dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang berbeda pula, apalagi pada masyarakat pedesaan yang berdekatan pantai yang berwatak keras.

Menurut Clinton F. Fink (dalam Kartini Kartono, 1982: 246) menyatakan bahwa:

Konflik adalah interaksi yang antagonistis, mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung; sampai pada bentuk perlawanan terbuka, kekerasan tidak terkontrol, benturan laten, pemogokan huru-hara, gerilya, perang, dan lain-lain.

Menangani dan menyelesaikan sebuah konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat tidaklah mudah, karena berbagai pertimbangan yang harus ditempuh dan dilaksanakan. Menyelesaikan konflik sosial bukan hanya tugas dari kepala desa semata, melainkan juga dari seluruh kalangan masyarakat. Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat adalah tanggung jawab bersama untuk segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan diantara masyarakat. Dalam menyelesaikan konflik sosial jika ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), bisa dikaji melalui *civic skill* atau kemampuan kewarganegaraan tetapi dapat didukung oleh *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dan *civic disposition*. (watak kewarganegaraan).

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Menurut Dasim Budimansyah (2008: 55), *Civic Knowledge* ini harus diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan, yaitu

(1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?; (2) Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia?; (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?; (4) Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia?; dan (5) Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia?"

Lima pertanyaan penting di atas secara terus menerus harus diajukan sebagai sumber belajar PKn. Namun, pengetahuan kewarganegaraan saja tidaklah cukup untuk menjawab masalah kewarganegaraan. Dalam *Civic Education*, masyarakat demokratis memiliki komponen yang esensial lainnya yaitu kecakapan warga negara (*civic skill*). Menurut Branson (dalam Dasim Budimansyah, 2008: 59), menyatakan bahwa:

Kecakapan warga negara dapat dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing*. Interaksi (*interacting*) berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi (*interacting*) adalah menjadi tanggap terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara damai dan jujur. Memonitor (*monitoring*) sistem politik dan pemerintahan, mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga

negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warga negara.

Uraian di atas menggambarkan bahwa kecakapan warga negara (*civic skill*) mencakup kecakapan intelektual dan kecakapan berinteraksi. Hal ini perlu dikembangkan untuk menghadapi masalah-masalah kewarganegaraan selain mempraktekan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang baik. Salah satu komponen *civic skill* yang dijelaskan di atas yaitu interaksi (*interacting*) dimana interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara damai dan jujur, selain itu dalam *civic skill* terdapat kemampuan untuk mengambil keputusan. Namun dalam menyelesaikan sebuah konflik sosial tidak hanya dibutuhkan kemampuan yang baik, tetapi juga harus mempunyai watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter publik dan privat. Menurut Dasim Budimansyah (2008: 61), karakter publik dan privat dapat dideskripsikan seperti:

menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan dibidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, dan mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat, perlu adanya seseorang atau beberapa orang yang nasehatnya bisa didengar dan dituruti oleh sebagian besar masyarakat di wilayah tertentu. Orang tersebut dapat menyelesaikan atau mengelola konflik dengan baik apabila ia memiliki kemampuan warga negara (*civic skill*) yang baik, selain itu harus mempunyai watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang baik pula. Dalam hal ini tokoh-tokoh desa yang dipercaya mempunyai kemampuan dan watak kewarganegaraan yang baik.

Tokoh-tokoh dalam hal ini adalah tokoh masyarakat diyakini dapat memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik, selain pejabat desa secara formal baik kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Begitu pentingnya peran tokoh-tokoh dalam sebuah daerah karena tokoh-tokoh maupun pemuka agama tersebut dianggap mempunyai jiwa kepemimpinan yang dianggap berpengaruh

dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat. Seperti yang dikemukakan Kimball Young (dalam Kartini Kartono, 1982: 58), yang menyatakan bahwa:

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi atau penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi suatu khusus untuk mencapai tujuan tertentu.

Kepemimpinan dan kewibawaan tokoh-tokoh ini adalah faktor utama bagaimana tokoh-tokoh ini disegani oleh masyarakatnya. Begitupula dengan cara tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat, umumnya berbeda pada setiap daerah, tergantung pada kemampuan dan persoalan yang dihadapi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang demokratis dan kharismatik, dimana pemimpin ini mau menerima saran dari anggota atau masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan Sondang Siagian (2010: 31), bahwa

tipe pemimpin yang demokratis sangat peduli pada kepentingan dan kebutuhan para bawahan, dan menghargai peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberitahukan kepada para bawahan tersebut bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu.

Dalam hal ini penulis meneliti konflik yang ada di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Karena pada desa ini, penulis menemukan banyak konflik-konflik sosial yang terjadi pada masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani atau petani. Meskipun sebagian besar daerah ini digunakan sebagai pertanian, namun desa ini berdekatan dengan pantai yang mengakibatkan cuaca panas sehingga masyarakat memiliki watak yang keras, baik dari ucapan maupun tingkah laku.

Selain memiliki watak yang keras, faktor lainnya yaitu masih rendahnya pendidikan dan banyaknya masyarakat yang miskin sehingga mudah untuk tersulutnya emosi dan terjadinya konflik. Bahkan tidak jarang, konflik tersebut berujung pada kekerasan sehingga mengakibatkan kerugian. Selain itu konflik juga ada yang berujung pada kasus pidana, dan otomatis berkaitan dengan pihak yang berwajib atau kepolisian. Dalam hal ini peran dari tokoh-tokoh masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh pemuda, maupun aparat desa sangat vital untuk menyelesaikan

konflik yang sering terjadi pada Desa Pegagan Lor ini. Adapun gambaran umum dari profil kependudukan dan kemiskinan Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.1

## Profil Kependudukan dan Kemiskinan Kecamatan Kapetakan

DESA	LUAS (M)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	PERSENTASE KELUARGA MISKIN
Bungko	1.322	4.645	1.290	39%
Kertasura	409	7.472	2.143	14%
Pegagan Kidul	667	7.241	1.956	38%
<b>Pegagan Lor</b>	<b>505</b>	<b>8.405</b>	<b>2.613</b>	<b>51%</b>
Dukuh	317	3.966	1.073	47%
Karangkendal	351	7.587	2.114	30%
Grogol	323	6.015	1.627	31%
Kapetakan	697	6.527	1.799	89%
Bungko lor	1.000	4.304	911	35%
<b>Kecamatan Kapetakan</b>	<b>5.589</b>	<b>56.162</b>	<b>15.526</b>	<b>42 %</b>

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Kapetakan pada tahun 2012.

Melihat dari faktor permasalahan dan konflik yang terjadi pada Desa Pegagan Lor ini, penulis ingin meneliti bagaimana cara tokoh-tokoh, baik dari tokoh agama, tokoh pemuda, maupun aparat desa yang ada di Desa ini bisa menangani dan memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena setiap masalah atau konflik ini harus segera diselesaikan secara baik-baik, dan jangan ditunda-tunda agar tidak berkepanjangan dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam hal ini bukan hanya kepala desa atau perangkat desa seperti seksi ketertiban dan keamanan desa sajalah setiap konflik dapat diselesaikan. Peran tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama juga ikut andil dalam upaya menjaga keharmonisan masyarakat. Adapun gambaran umum konflik di Desa Pegagan Lor ini dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2

Gambaran umum konflik di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Cirebon.

No.	Jenis Konflik	Penyebab	Tahun	Keterangan
1.	Antar desa	Terjadinya tawuran antar desa ini karena kedua pemuda tersebut saling mengejek sama lain, yaitu antara Desa Pegagan Lor dengan Desa Pegagan Kidul.	2010	10 orang luka-luka.
2.	Antar kampung	Tawuran antar warga terjadi karena adanya hiburan malam di Desa Pegagan Lor. Warga yang bertikai antara warga RW. 03 Dusun dengan RW 02 Dusun II.	2011	5 orang luka-luka
3.	Antar warga	Konflik terjadi karena ketidakpuasan salah satu kandidat pemilihan kepala desa yang kalah. Akhirnya terjadi benturan antara pendukung calon kepala desa yang menang dengan pendukung calon kepala desa yang kalah.	2012	10 orang luka-luka
4.	Antar pemuda	Konflik ini terjadi hampir setiap ada pertunjukan organ tunggal, atau talingan. Karena pengaruh alkohol, akhirnya pemuda tersebut tidak sadar dan terjadilah perkelahian antar pemuda ketika sedang bergoyang.	2013	

Sumber: Data dari Aparat Desa Pegagan Lor pada tahun 2013.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis mengangkat judul **“KAJIAN TERHADAP KETERAMPILAN TOKOH-TOKOH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK MASYARAKAT DESA PEGAGAN LOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF PKN.”** (Studi Kasus Pada Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon).

### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana keterampilan tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat dengan perspektif PKN.. Adapun rumusan masalah dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya konflik sosial pada masyarakat di Desa Pegagan Lor?
2. Bagaimanakah keterampilan tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat di Desa Pegagan Lor ditinjau dari perspektif PKN?
3. Apa saja kendala yang dihadapi tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Pegagan Lor?
4. Bagaimana tokoh-tokoh mengatasi kendala dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat Desa Pegagan Lor ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat ditinjau dari perspektif PKN.

#### 2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan penelitian secara umum di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

Agung Maulana, 2014

*Kajian Terhadap Keterampilan Tokoh-Tokoh Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Desa Pegagan Lor ditinjau Dari Perspektif PKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a) Untuk mengetahui faktor terjadinya konflik sosial pada masyarakat di Desa Pegagan Lor.
- b) Untuk mengetahui keterampilan tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat yang terjadi di Desa Pegagan Lor ditinjau dari perspektif PKN.
- c) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat Desa Pegagan Lor.
- d) Untuk mengetahui bagaimana tokoh-tokoh mengatasi kendala dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat Desa Pegagan Lor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat diperoleh setelah melalui kegiatan penelitian penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

##### **a. Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peranan tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat, yang dapat dikaji dalam mata kuliah Ilmu Politik, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

##### **b. Praktis**

Dengan mengetahui peran tokoh-tokoh dalam memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik, diharapkan penelitian ini :

- 1) Diketuainya faktor terjadinya konflik sosial pada masyarakat di Desa Pegagan Lor.
- 2) Diketuainya keterampilan tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat yang terjadi di Desa Pegagan Lor ditinjau dari perspektif PKN.
- 3) Diketuainya kendala apa saja yang dihadapi tokoh-tokoh dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat Desa Pegagan Lor.
- 4) Diketuainya bagaimana tokoh-tokoh mengatasi kendala dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat Desa Pegagan Lor.

#### **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab skripsi mulai dari bab satu hingga bab terakhir. Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang secara garis besar bisa dilihat dibawah ini.

#### BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasidan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Struktur Organisasi Skripsi

#### BAB II Kajian Pustaka

- A. Tinjauan Umum tentang Keterampilan Sosial
- B. Tinjauan Umum tentang Kepemimpinan
- C. Tinjauan Umum tentang Masyarakat
- D. Tinjauan Umum tentang Konflik Sosial
- E. Tinjauan Umum tentang Kompetensi Kewarganegaraan

#### BAB III Metodologi Penelitian

- A. Pendekatan dan Metode Penelitian
- B. Teknik Pengumpulan Data
- C. Lokasi dan Subjek Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Tahap Penelitian
- F. Validitas Data
- G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan Hasil Penelitian

#### BAB V Kesimpulan dan Saran